

LAPORAN

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

2024



TRIWULAN IV
Tahun 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Balai Diklat Keagamaan Surabaya

Disahkan Tanggal: 30 Desember 2024

Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya



Dr. H. Japar M. Pd

wp. 196812311994031026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, dan atas karunia, hidayah serta inayah-Nya, Laporan Hasil **Survei Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya** dapat terselesaikan. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran persepsi peserta pelatihan terkait korupsi selama berlangsungnya kegiatan pelatihan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perbaikan kualitas kinerja di Balai Diklat Keagamaan Surabaya.

Panitia **Survei Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya** mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sejak pelaksanaan survei hingga penyusunan laporan ini. Segala saran dan masukan sangat diperlukan karena kami menyadari adanya kekurang-sempurnaan dalam laporan ini. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Hasil **Survei Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya**.

Surabaya, Desember 2024

Tim Pelaksana

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. LATAR BELAKANG	6
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.3. RUANG LINGKUP DAN BATASAN	7
1.4. HASIL YANG INGIN DICAPAI	7
BAB II METODE PENGUKURAN	8
2.1. POPULASI DAN SAMPEL	8
2.2. WAKTU DAN TEMPAT	8
2.3. RESPONDEN	8
2.4. KUESIONER	8
2.5. NILAI PERSEPSI	9
BAB III HASIL PENGUKURAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	10
3.1. PROFIL RESPONDEN	10
3.2. HASIL PERHITUNGAN IPA K	13
3.3. REKAPITULASI NILAI	20
BAB IV PENUTUP	23
4.1. KESIMPULAN	23
4.2. REKOMENDASI	23
LAMPIRAN	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Karakteristik Gender Responden	11
Gambar 3.2. Karakteristik Kelompok Umur Responden	12
Gambar 3.3. Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden	12
Gambar 3.4. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Manipulasi Peraturan	13
Gambar 3.5. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Penyalahgunaan Jabatan	14
Gambar 3.6. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Menjual Pengaruh	15
Gambar 3.7. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Hadiah	15
Gambar 3.8. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Biaya	16
Gambar 3.9. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Pencaloan	17
Gambar 3.10. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Perbuatan Curang	18
Gambar 3.11. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transaksi Rahasia	18
Gambar 3.12. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Aduan	19
Gambar 3.13. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Respon Terhadap Aduan	20
Gambar 3.14. Indeks Persepsi Anti Korupsi per Rumpun Pelatihan	21
Gambar 3.15. Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Unsur Penilaian	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Nilai Persepsi	9
Tabel 3.1.	Pelatihan oleh BDK Surabaya Oktober - Desember 2024	10
Tabel 3.2.	Tingkat Partisipasi Survei	11
Tabel 3.3.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Manipulasi Peraturan.....	13
Tabel 3.4.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Penyalahgunaan Jabatan	14
Tabel 3.5.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Menjual Pengaruh.....	14
Tabel 3.6.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Hadiah.....	15
Tabel 3.7.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Biaya	16
Tabel 3.8.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Pencaloan.....	17
Tabel 3.9.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Perbuatan Curang	17
Tabel 3.10.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transaksi Rahasia	18
Tabel 3.11.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Aduan	19
Tabel 3.12.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Respon Terhadap Aduan.....	20
Tabel 3.13.	Rekapitulasi Indeks Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya.....	20
Tabel 3.14.	Indeks Persepsi Anti Korupsi per Rumpun Pelatihan	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Balai Diklat Keagamaan Surabaya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah tersusunnya indeks persepsi anti korupsi yang sekaligus menjadi parameter Pemerintah yang Bersih dan Melayani.

Balai Diklat Keagamaan Surabaya merupakan lembaga pemerintah yang menjadi UPT Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan diklat di wilayah kerja Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 59 tahun 2015, tugas Balai Diklat Keagamaan adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) tenaga administrasi serta tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. Diklat yang diselenggarakan terdiri dari diklat sebelum pegawai menduduki jabatan (pelatihan dasar/latsar), diklat dalam jabatan dan diklat kepemimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Diklat Keagamaan Surabaya senantiasa terkait dengan aktivitas pelayanan kepada peserta diklat. Diharapkan pelayanan yang diberikan adalah pelayanan publik yang bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.

Demi terwujudnya pelayanan kediklatan yang bebas dari korupsi, dilakukan penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Persepsi yang baik dari peserta diklat akan ditunjukkan dari tingginya perolehan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Sedangkan IPAK yang rendah menunjukkan kurang pedulinya lembaga terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Perolehan IPAK tersebut selanjutnya bisa dijadikan dasar dalam penerapan kebijakan terkait pelayanan yang bebas dari korupsi.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum maksud dan tujuan dilaksanakannya Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai Persepsi Anti Korupsi dari pengguna layanan pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Di samping itu, juga bertujuan untuk mendapatkan referensi yang valid dalam menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan secara kontinyu serta mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi diharapkan dapat menjadi rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. RUANG LINGKUP DAN BATASAN

Pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi di Balai Diklat Keagamaan Surabaya untuk triwulan IV dilakukan dalam kurun waktu Bulan Oktober hingga Desember Tahun 2024 dengan melibatkan peserta yang mengikuti pelatihan selama kurun waktu tersebut.

1.4. HASIL YANG INGIN DICAPAI

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi mengenai Persepsi Anti Korupsi dari pengguna layanan diklat di Balai Diklat Keagamaan Surabaya.

BAB II

METODE PENGUKURAN

2.1. POPULASI DAN SAMPEL

Dalam kegiatan ini, yang menjadi populasi adalah seluruh peserta Pelatihan BDK Surabaya baik itu dalam pola klasikal maupun non klasikal, yang diselenggarakan selama Bulan Oktober hingga Desember Tahun 2024. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *voluntary response sampling* yaitu penentuan sampel yang terdiri dari *self-chosen respondent*. Dalam arti lain, para responden secara sukarela mengambil bagian dalam studi penelitian untuk berbagi pendapat mereka tentang topik yang sedang dibahas. Teknik ini dipilih atas pertimbangan kemudahan dan efisiensi waktu. Data yang dikumpulkan adalah data primer dengan metode pengumpulan data berupa survei secara *online* via *google form* dengan jenis data kuantitatif dan kualitatif.

2.2. WAKTU DAN TEMPAT

Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan sejak Oktober hingga Desember 2024. Survei dilaksanakan secara *online* di tempat pelatihan masing-masing. Responden menjawab pertanyaan yang diajukan melalui *google form*. Kuesioner survei dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://bit.ly/spak2024>

2.3. RESPONDEN

Kriteria untuk responden Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV adalah peserta Pelatihan yang diadakan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya selama Bulan Oktober hingga Desember 2024. Untuk menghindari bias, responden yang dipilih ialah mereka yang sedang melakukan atau yang telah melakukan pelatihan dalam waktu referensi survei berlangsung.

2.4. KUESIONER

Kuesioner dipilih sebagai alat bantu pengumpulan data guna menyusun Indeks Persepsi Anti Korupsi. Unsur yang dipakai untuk mengukur persepsi peserta pelatihan dalam survei ini sebanyak sepuluh unsur yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban berskala

ordinal, yaitu “selalu”, “sering”, “jarang”, “tidak ada” dengan skor untuk masing-masing jawaban dari angka 1,2,3, dan 4. Kesepuluh unsur tersebut terdiri dari:

- 1) Manipulasi peraturan;
- 2) Penyalahgunaan jabatan;
- 3) Menjual pengaruh;
- 4) Hadiah;
- 5) Transparansi Biaya;
- 6) Pencaloan;
- 7) Perbuatan curang;
- 8) Transaksi rahasia;
- 9) Transparansi Aduan
- 10) Respon terhadap pengaduan.

2.5. NILAI PERSEPSI

Penilaian persepsi sangat penting dalam mengukur hasil pelaksanaan survei Persepsi Anti Korupsi. Dalam membaca interval hingga penilaian kinerja pelayanan, tabel nilai persepsi dapat memandu masyarakat dalam menyimpulkan kinerja pelayanan suatu institusi. Sehingga baik institusi maupun masyarakat nantinya dapat memberikan sumbangsih saran, pendapat hingga kritikan yang membangun. Berikut adalah nilai persepsi, nilai interval, nilai konversi, mutu, dan kinerja pelayanan.

Tabel 2.1. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

HASIL PENGUKURAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. PROFIL RESPONDEN

Sepanjang Triwulan IV Tahun 2024, BDK Surabaya setidaknya telah melaksanakan 14 Pelatihan. Pelatihan-pelatihan ini dilaksanakan dalam pola tatap muka dan dalam jaringan melalui skema Pelatihan di Wilayah Kerja, reguler dalam kampus, maupun campuran. Berikut ditabulasikan pelatihan yang diselenggarakan selama Bulan Juli hingga September 2024 beserta jenis dan pola pelatihannya.

Tabel 3.1. Pelatihan oleh BDK Surabaya Oktober - Desember 2024

No	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Pola Pelatihan
1	Orientasi PPPK XVIII	16 okt s.d. 19 okt	Pelatihan Administrasi	ODK
2	Orientasi PPPK XIX	16 okt s.d. 19 okt	Pelatihan Administrasi	ODK
3	Orientasi PPPK XX	16 okt s.d. 19 okt	Pelatihan Administrasi	ODK
4	Orientasi PPPK XXI	16 okt s.d. 19 okt	Pelatihan Administrasi	ODK
5	Orientasi PPPK XXII	16 okt s.d. 19 okt	Pelatihan Administrasi	ODK
6	Orientasi PPPK XXIII	28 okt s.d. 31 okt	Pelatihan Administrasi	ODK
7	Orientasi PPPK XXIV	28 okt s.d. 31 okt	Pelatihan Administrasi	ODK
8	Orientasi PPPK XXV	28 okt s.d. 31 okt	Pelatihan Administrasi	ODK
9	Orientasi PPPK XXVI	28 okt s.d. 31 okt	Pelatihan Administrasi	ODK
10	Orientasi PPPK XXVII	28 okt s.d. 31 okt	Pelatihan Administrasi	ODK
11	LATSAR CPNS Kemenag Ak. I	26 agst s.d 16 nov	Pelatihan Administrasi	Reguler Blended
12	LATSAR CPNS Kemenag Ak. II	26 agst s.d 16 nov	Pelatihan Administrasi	Reguler Blended
13	Pelatihan Pengelolaan BOS Kota Surabaya	12 – 20 des 2024	Pelatihan Administrasi	PDWK Blended
14	Pelatihan Manajemen Kemasjidan Kota Surabaya	11 – 21 des 2024	Pelatihan Teknis Keagamaan	PDWK Blended

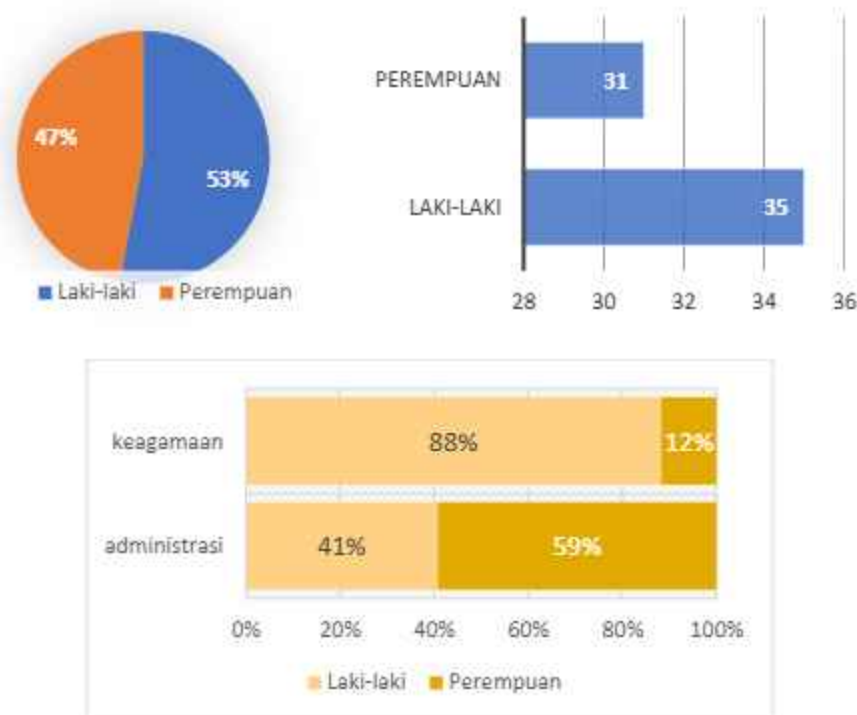
Selama periode survei triwulan IV, sebanyak **67 responden** telah berpartisipasi dalam Survei Persepsi Anti Korupsi yang diadakan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Dalam triwulan keempat Tahun 2024, tingkat partisipasi survei untuk peserta Pelatihan Tenaga Administrasi adalah sebanyak **49 responden** sedangkan tingkat partisipasi survei untuk peserta Pelatihan

Tenaga Teknis Keagamaan adalah sebanyak **17 responden**. Responden tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori responden untuk diketahui karakteristiknya.

Tabel 3.2. Tingkat Partisipasi Survei

Jenis Pelatihan	Jumlah Responden Terlibat
Pelatihan Teknis Keagamaan	17
Pelatihan Administrasi	49

Partisipasi peserta dalam pelatihan yang diadakan oleh BDK Surabaya selama Triwulan IV tahun 2024 didominasi oleh peserta laki-laki dengan porsi 53 persen. Dari gambar 3.1 ditunjukkan bahwa dari total 66 responden, sebanyak 35 orang adalah laki-laki sedangkan sisanya adalah perempuan. Jika diperhatikan per rumpun pelatihan, tampak variasi dalam karakteristik gender responden. Peserta Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan didominasi oleh laki-laki yakni sebanyak 88 persen dari sejumlah responden dari pelatihan tersebut. Sebaliknya, perempuan lebih mendominasi Pelatihan Tenaga Administrasi sebesar 59 persen.



Gambar 3.1. Karakteristik Gender Responden

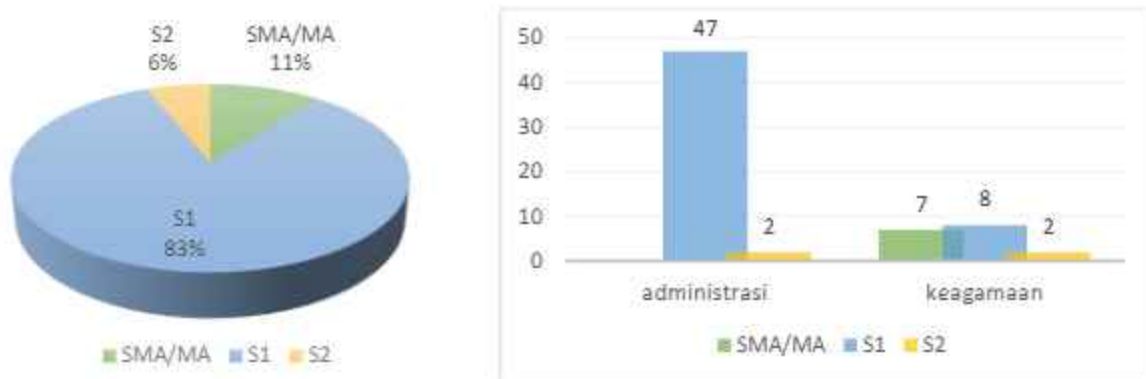
Dari gambar 3.2 diketahui bahwa sebaran usia responden pada survei kali ini tampak beragam. Sebanyak 26 orang merupakan responden dari kelompok umur 30-39 tahun, kemudian 22 orang berusia antara 40-49 tahun. Lalu sebanyak 13 orang adalah responden dalam kelompok

usia di bawah 30 tahun, sedangkan sisanya sebanyak 5 orang merupakan kelompok berusia lebih dari 49 tahun.



Gambar 3.2. Karakteristik Kelompok Umur Responden

Responden yang mewakili pelatihan tenaga administrasi lebih banyak berasal dari kelompok usia 30-39 tahun. Sementara pelatihan tenaga teknis keagamaan lebih banyak diikuti oleh kelompok usia 40-49 tahun.



Gambar 3.3. Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden

Dari keseluruhan peserta pelatihan BDK Surabaya selama triwulan keempat tahun 2024, sebanyak 83 persen dari populasi merupakan tamatan sarjana, disusul dengan responden dengan pendidikan terakhir SMA/MA sebanyak 11%, dan para magister sebanyak 6 persen. Para sarjana mendominasi kedua rumpun pelatihan yakni 47 orang di pelatihan tenaga administrasi, dan 8 orang di pelatihan teknis keagamaan. Responden dengan pendidikan terakhir SMA/MA hanya tersebar di rumpun pelatihan teknis keagamaan.

3.2. HASIL PERHITUNGAN IPAK

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat sepuluh unsur yang dinilai dalam survei Persepsi Anti Korupsi. Berikut ini akan diuraikan hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi untuk masing-masing unsur.

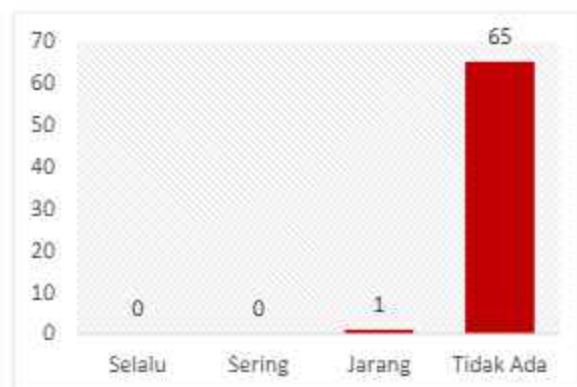
3.2.1. Penilaian Setiap Unsur

a. Manipulasi Peraturan

Dari total responden sebanyak 66 responden, 65 orang di antaranya setuju bahwa tidak ada manipulasi peraturan di BDK Surabaya, dan sisanya sebanyak 1 orang menyatakan jarang menemui peristiwa manipulasi peraturan di BDK Surabaya. Dari skala 1-4, persepsi publik terhadap indikator manipulasi peraturan mendapatkan indeks sebesar 3,98. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa BDK Surabaya **bersih dari manipulasi peraturan**.

Tabel 3.3. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Manipulasi Peraturan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	0	0,00%
Sering	2	0	0,00%
Jarang	3	1	1,52%
Tidak Ada	4	65	98,48%
Jumlah		66	100%



Gambar 3.4. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Manipulasi Peraturan

b. Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1-4, persepsi mengenai penyalahgunaan jabatan berhasil mencapai indeks 4,00. Indeks ini diperoleh berkat seluruh responden menyatakan bahwa tidak ada penyalahgunaan jabatan di lingkungan BDK Surabaya. Dari perolehan indeks tersebut, BDK Surabaya dinyatakan **bersih dari penyalahgunaan jabatan**.

Tabel 3.4. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Penyalahgunaan Jabatan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	0	0,00%
Sering	2	0	0,00%
Jarang	3	0	0,00%
Tidak Ada	4	66	100,0%
Jumlah		66	100,0%



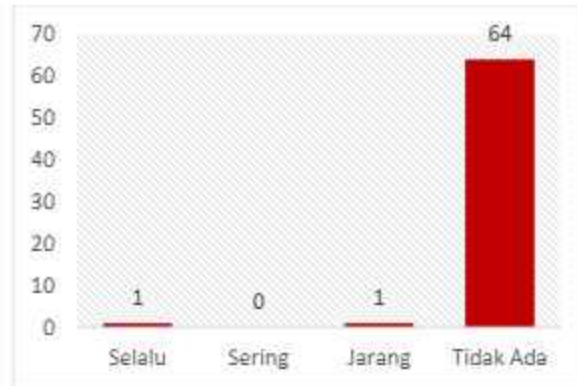
Gambar 3.5. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Penyalahgunaan Jabatan

c. Menjual Pengaruh

Dari total 66 responden, 64 orang diantaranya menyatakan tidak pernah dihubungi oleh pegawai BDK Surabaya untuk membantu pengurusan berkas tertentu. Sisanya, masing-masing sebanyak 1 orang menyatakan bahwa mereka jarang dan selalu melihat praktik menjual pengaruh di BDK Surabaya. Dari pengumpulan data tersebut, didapatkan nilai persepsi sebesar **3,94** sehingga dapat disimpulkan bahwa BDK Surabaya **bersih dari tindakan menjual pengaruh**.

Tabel 3.5. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Menjual Pengaruh

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	1	1,52%
Sering	2	0	0,00%
Jarang	3	1	1,52%
Tidak Ada	4	64	96,97%
Jumlah		66	100,0%



Gambar 3.6. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Menjual Pengaruh

d. Hadiah

Persepsi untuk unsur ini diukur melalui pertanyaan, “Apakah Anda memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima, meskipun tidak diminta?” sebanyak 92,42 persen dari responden menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tersebut, 5 orang atau sekitar 7,58 persen menyatakan jarang memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima meskipun tidak pernah diminta. Dari pengumpulan data ini, diperoleh indeks persepsi sebesar **3,92**. Angka ini dapat diartikan bahwa BDK Surabaya **bersih dari gratifikasi** atau penerimaan hadiah.

Tabel 3.6. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Hadiah

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	0	0,00%
Sering	2	0	0,00%
Jarang	3	5	7,58%
Tidak Ada	4	61	92,42%
Jumlah		66	100,0%



Gambar 3.7. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Hadiah

e. Transparansi Biaya

Biaya/tarif pelayanan yang dibebankan kepada peserta dalam rangka mengikuti Pelatihan di Wilayah Kerja (PDWK) maupun Pelatihan Reguler dalam Kampus BDK Surabaya adalah 0 (nol) rupiah atau gratis. Di samping sertifikat, peserta juga berhak mendapatkan honorarium sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Honorarium ini diserahkan setelah pelatihan berakhir dan dibuktikan melalui SPJ dan kitir yang diserahkan kepada masing-masing peserta. Melalui kitir inilah rincian honorarium peserta dapat dilihat. Dalam rangka mengukur persepsi publik mengenai transparansi biaya di BDK Surabaya, tim survei mengajukan pertanyaan berupa, **“Apakah BDK Surabaya tidak memberikan bukti transaksi keuangan setelah proses layanan pelatihan dilakukan?”**

Tabel 3.7. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Biaya

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	3	4,55%
Sering	2	1	1,52%
Jarang	3	2	3,03%
Tidak Ada	4	60	90,91%
Jumlah		66	100,0%



Gambar 3.8. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Biaya

Dari total 66 responden, sebanyak 60 orang diantaranya menyatakan bahwa tidak ada pelaksana kegiatan yang terlupa memberikan bukti transaksi. Sebanyak 2 orang menyatakan jarang, 1 orang menyatakan sering, dan ada 3 orang yang menyatakan bahwa pelaksana kegiatan selalu tidak memberikan bukti transaksi keuangan setelah proses pelayanan pelatihan. Berdasarkan data tersebut, didapatkan indeks persepsi publik sebesar 3,80. Angka tersebut menunjukkan bahwa publik percaya BDK Surabaya bersih dalam hal transparansi biaya.

f. **Pencaloan**

Dari skala 1-4 unsur pencaloan memperoleh indeks persepsi sebesar 4,00. Hal ini berarti para responden menganggap bahwa layanan pelatihan yang diberikan oleh BDK Surabaya **bersih dari unsur pencaloan**. Seluruh responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengetahui adanya praktik pencaloan di BDK Surabaya.

Tabel 3.8. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Pencaloan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	0	0,00%
Sering	2	0	0,00%
Jarang	3	0	0,00%
Tidak Ada	4	66	100,00%
Jumlah		66	100,0%



Gambar 3.9. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Pencaloan

g. **Perbuatan Curang**

Dari total responden sebanyak 66 responden, seluruhnya menyatakan bahwa mereka tidak pernah melihat/mendengar adanya praktik KKN di BDK Surabaya. Dari skala 1-4, persepsi publik terhadap unsur perbuatan curang adalah sebesar **4,00**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa BDK Surabaya **bersih dari praktik KKN** (perbuatan curang).

Tabel 3.9. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Perbuatan Curang

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	0	0,00%
Sering	2	0	0,00%
Jarang	3	0	0,00%
Tidak Ada	4	66	100,00%
Jumlah		66	100,0%



Gambar 3.10. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Perbuatan Curang

h. Transaksi Rahasia

Pada triwulan keempat tahun 2024, unsur transaksi rahasia memperoleh indeks persepsi sempurna sebesar **4,00**. Terdapat 66 orang yang percaya bahwa tidak ada transaksi rahasia di BDK Surabaya. Berdasarkan perolehan tersebut, dapat dikatakan bahwa publik menganggap BDK Surabaya **bersih dari transaksi rahasia**,

Tabel 3.10. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transaksi Rahasia

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	0	0,00%
Sering	2	0	0,00%
Jarang	3	0	0,00%
Tidak Ada	4	66	100,00%
Jumlah		66	100,0%



Gambar 3.11. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transaksi Rahasia

i. Transparansi Aduan

Sebanyak 63 responden atau sekitar 95,45 persen dari total responden mengatakan bahwa BDK Surabaya terbuka terhadap pengaduan/laporan masyarakat terkait korupsi. Sebanyak

1 orang atau sekitar 1,52 persen responden menyatakan jarang terbuka terhadap pengaduan/laporan masyarakat terkait korupsi, dan 2 orang atau sekitar 3,03 persen menyatakan BDK Surabaya tidak terbuka terhadap pengaduan/laporan masyarakat terkait korupsi. Dari skala 1-4, indeks persepsi yang diperoleh untuk unsur transparansi aduan adalah sebesar 3,89, Berdasarkan perolehan indeks persepsi ini, BDK Surabaya dapat dikatakan **bersih dalam hal transparansi aduan.**

Tabel 3.11. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Aduan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	2	3,03%
Sering	2	0	0,00%
Jarang	3	1	1,52%
Tidak Ada	4	63	95,45%
Jumlah		66	100,0%



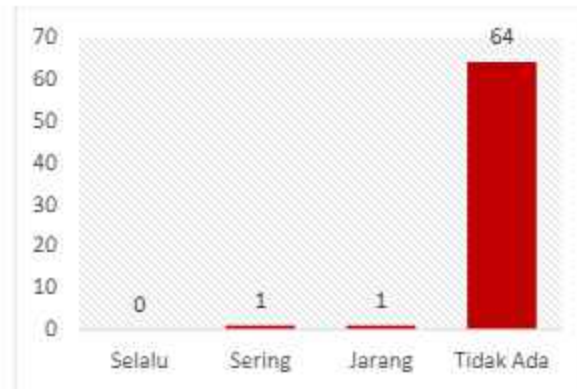
Gambar 3.12. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Aduan

j. Respon Terhadap Aduan

Selama survei berlangsung, responden disuguhkan pertanyaan berupa, “Apakah BDK Surabaya merespon lambat pengaduan/laporan masyarakat terkait korupsi?”, Terdapat 64 responden atau sekitar 96,97 persen yang menyatakan tidak ada respon lambat terhadap aduan terkait korupsi. Masing-masing sebanyak 1 orang, atau sekitar 1,52 persen dari total responden mengatakan bahwa respon lambat terhadap aduan jarang dan sering terjadi di BDK Surabaya. Melalui pengumpulan data tersebut dapat diketahui bahwa persepsi publik terhadap unsur respon terhadap aduan mencapai indeks 3,95 yang berarti bahwa BDK Surabaya **bersih dalam hal respon terhadap aduan.**

Tabel 3.12. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Respon Terhadap Aduan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	0	0,00%
Sering	2	1	1,52%
Jarang	3	1	1,52%
Tidak Ada	4	64	96,97%
Jumlah		66	100,0%



Gambar 3.13. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Respon Terhadap Aduan

3.3. REKAPITULASI NILAI

Dari uraian penilaian unsur di atas, selanjutnya dibuat perbandingan antar unsur. Berdasarkan tabel 3,13 tampak bahwa unsur penyalahgunaan jabatan, pencaloan, pembuatan curang, dan transaksi rahasia merupakan dua unsur yang mendapatkan nilai persepsi tertinggi. Masing-masing unsur tersebut memperoleh indeks persepsi rata-rata sebesar 4,00. Sedangkan unsur transparansi biaya merupakan unsur dengan nilai terendah daripada unsur yang lain. Tingkat persepsi masyarakat untuk unsur ini hanya mencapai 3,80. Meski begitu, kesepuluh unsur yang dinilai semuanya dinyatakan **bersih dari korupsi** berdasarkan persepsi publik.

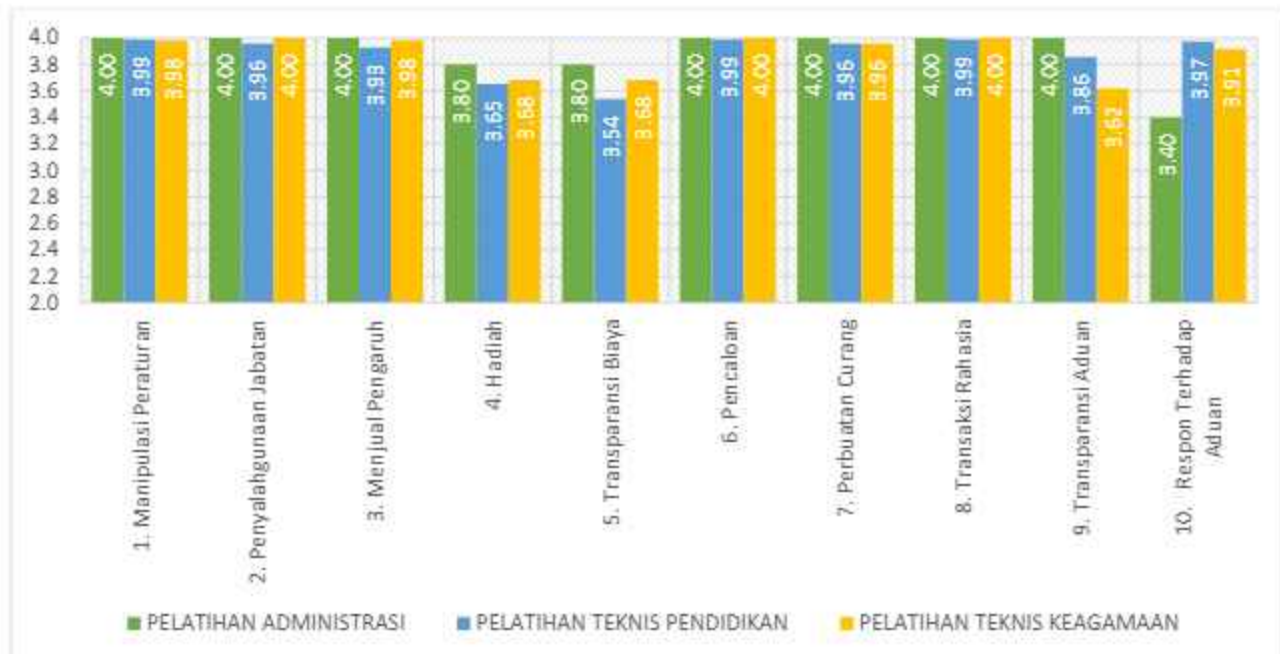
Tabel 3.13. Rekapitulasi Indeks Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya

UNSUR PENILAIAN	NILAI PERSEPSI	KINERJA UNIT PELAYANAN
MANIPULASI PERATURAN	3,98	Bersih dari korupsi
PENYALAHGUNAAN JABATAN	4,00	Bersih dari korupsi
MENJUAL PENGARUH	3,94	Bersih dari korupsi
HADIAH	3,92	Bersih dari korupsi
TRANSPARANSI BIAYA	3,80	Bersih dari korupsi
PENCALOAN	4,00	Bersih dari korupsi
PERBUATAN CURANG	4,00	Bersih dari korupsi
TRANSAKSI RAHASIA	4,00	Bersih dari korupsi
TRANSPARANSI ADUAN	3,89	Bersih dari korupsi
RESPON TERHADAP ADUAN	3,95	Bersih dari korupsi
NILAI IPAK	3,95	Bersih dari korupsi

Tabel 3.14. Indeks Persepsi Anti Korupsi per Rumpun Pelatihan

UNSUR PENILAIAN	IPAK	
	PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI	PELATIHAN TENAGA TEKNIS KEAGAMAAN
	1. Manipulasi Peraturan	4,00
2. Penyalahgunaan Jabatan	4,00	4,00
3. Menjual Pengaruh	3,92	4,00
4. Hadiah	3,94	3,88
5. Transparansi Biaya	3,88	3,59
6. Pencaloan	4,00	4,00
7. Perbuatan Curang	4,00	4,00
8. Transaksi Rahasia	4,00	4,00
9. Transparansi Aduan	3,94	3,76
10. Respon Terhadap Aduan	3,98	3,88
NILAI IPAK	3,97	3,91

Kedua rumpun pelatihan mendapatkan predikat “bersih dari korupsi” dengan perolehan IPAK yang berselisih. Pelatihan tenaga administrasi memperoleh nilai IPAK lebih tinggi dibanding pelatihan tenaga teknis keagamaan, yakni 3,97 berbanding 3,91. Indeks persepsi anti korupsi untuk masing-masing unsur dapat dilihat di tabel 3,14. Baik pada pelatihan tenaga administrasi maupun pelatihan tenaga teknis keagamaan, unsur transparansi biaya merupakan unsur yang memperoleh IPAK paling rendah. Unsur transparansi biaya pada pelatihan tenaga teknis keagamaan mendapatkan IPAK sebesar 3,59. Sementara unsur transparansi biaya pada pelatihan tenaga administrasi 0,29 poin lebih tinggi yakni 3,88.



Gambar 3.14. Indeks Persepsi Anti Korupsi per Rumpun Pelatihan

Evaluasi terhadap hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan BDK Surabaya dapat dilakukan dengan mengurutkan dan membandingkan nilai IPAK terkecil untuk setiap unsur. Dari sepuluh unsur penyusun indeks persepsi anti korupsi, Balai Diklat Keagamaan Surabaya memiliki empat unsur yang nilainya di bawah IPAK.



Gambar 3.15. Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Unsur Penilaian

Unsur tersebut adalah transparansi biaya, dan transparansi aduan, hadiah, dan menjual pengaruh. Keempat unsur inilah yang seluruhnya memiliki nilai di bawah IPAK total. Unsur-unsur tersebut perlu mendapatkan prioritas perbaikan sebagai upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap BDK Surabaya yang bersih melayani.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Gambaran dan analisis hasil capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi yang disajikan dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi cerminan persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya, sehingga rencana perbaikan yang akan dirumuskan benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat pengguna pelayanan publik (peserta pelatihan),

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indeks Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya pada triwulan ketiga tahun 2024 mencapai nilai **3,95** dari skala 4. Hal ini berarti bahwa masyarakat percaya layanan yang diberikan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya bersih dari korupsi.
2. Masyarakat percaya bahwa BDK Surabaya bersih dari penyalahgunaan jabatan, pencaloan, perbuatan curang, dan transaksi rahasia sebesar 4,00 atau bernilai sempurna. Keempat unsur ini merupakan unsur yang memperoleh indeks persepsi anti korupsi paling tinggi.
3. Unsur "transparansi biaya" merupakan unsur dengan nilai persepsi paling rendah dibandingkan unsur lainnya, Meski begitu, secara umum kinerja untuk unsur ini masuk dalam kategori "bersih dari korupsi",

4.2. REKOMENDASI

Beberapa hal yang mungkin dapat diperhatikan agar kepercayaan masyarakat meningkat terhadap layanan BDK Surabaya antara lain:

1. Panitia kegiatan memberikan penjelasan mengenai rincian honorarium peserta pada saat pengarahan program pelatihan serta memberikan cetak fisik rincian honorarium peserta sebagai upaya transparansi biaya,
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SP4N – LAPOR! dalam upaya penghimpunan aduan masyarakat terkait korupsi, Penghimpunan aduan kemudian dilaporkan pada masyarakat melalui infografis yang dipublikasikan di media sosial, beserta tindak lanjutnya,
3. Mengoptimalkan keberadaan lemari anti gratifikasi untuk menanggapi hadiah-hadiah yang diberikan oleh peserta pelatihan,

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

doc.google.com/document/d/1FA0C3RgFRqPULz3a0dLzrV0Qj0T13C3R3-Itu2B43Fw/viewform

Phetapex | Online F... Google Sheets Tab... Cara Uj. Analisis B...

Phetapex | Online F... Google Sheets Tab... Cara Uj. Analisis B... AI Business

Kementerian Agama RI
Balai Diklat Keagamaan Surabaya

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN SURABAYA TAHUN 2024

Sapak/ibu yang terhormat,
Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2017-2025, dan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan PAN & RB Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah Balai Pendidikan dan Pelatihan (Balai) Keagamaan Surabaya berorientasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan menjadi lembaga yang bersih dari korupsi.

Oleh karena itu, kami mengadakan survey secara online. Tujuan survey ini adalah untuk

doc.google.com/document/d/1FA0C3RgFRqPULz3a0dLzrV0Qj0T13C3R3-Itu2B43Fw/viewform

Phetapex | Online F... Google Sheets Tab... Cara Uj. Analisis B... AI Business

Jenis Kelamin *

Laki-laki

Perempuan

Usia *

Jumlahnya Angka

Pendidikan Terakhir *

SMA/MA

D3

S1

S2

S3

doc.google.com/forms/d/1FAyC3DhgFkqPUL5sacZkay7NGjJ1T3bC9Q-B6zPK3Bw/viewform

Pilih

Pangkat/Golongan *

Pilih

No. ID *

Jawaban Anda

Instansi *

Cersah, Kerkenerag Kab. Tectan

Jawaban Anda

Unit Tugas *

Jawaban Anda

doc.google.com/forms/d/1FAyC3DhgFkqPUL5sacZkay7NGjJ1T3bC9Q-B6zPK3Bw/viewform

Pilih

Pelatihan yang Dilakui pada Tahun 2024 *

Pilih

Apakah pemberian layanan di BDK Surabaya disertai untuk maknua tertentu? (Manipulasi Peraturan) *

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Apakah layanan pada BDK Surabaya diberikan dengan pemintan imbalan tertentu oleh pelngas? (Penyebaburuaan Jabatan) *

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Penilaian Anda dihubungi oleh pegawai BDK Surabaya yang akan membantu dalam pengurusan perkara tersebut? (Menjui Pengarah)

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Apakah Anda memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima, meskipun tidak diminta? (Layanan)

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Apakah Anda menandatangani bukti transaksi berupa SPJ atas hal-hal yang diterima? (Transparansi)

1. Tidak Ada 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu

Apakah Anda pernah mengetahui ada praktik pencucian dalam proses layanan di BDK Surabaya? (Pencucian)

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Apakah Anda pernah melihat dan/atau mendengar masalah terjadi praktik KKN di BDK Surabaya? (Perbuatan Curang)

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Apakah Anda pernah mengurus berkas tertentu melalui pegawai BDK Surabaya di luar kantor? (Transaksi Rahasia)

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

docs.google.com/forms/d/1TAyQ35NgF8yP9jI6xkKtZn79GyJ1T5ECHO-1foZKCI8w/viewform

Photos (Online P... Google Sheets, N... CAK 12-44833 N...

AI Bismillah

Apakah BDK Surabaya telah terbuka terhadap pengaduan/laporan masyarakat terkait korupsi?

1. Setuju 2. Seting 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Apakah BDK Surabaya merespon laporan pengaduan/laporan masyarakat terkait korupsi?

1. Setuju 2. Seting 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Kirim

Kembalikan formulir

